

DISKOMINFO

Fraksi Persatuan Menyatakan Raperda Tahun 2023 Layak untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

Anton Atong Sugandhi - PANGANDARAN.DISKOMINFO.ID

Jul 2, 2024 - 12:59





PANGANDARAN JAWA BARAT - Pimpinan dan rapat Dewan yang terhormat, dengan latar belakang pemikiran yang telah disampaikan, maka Fraksi Persatuan menyatakan Rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2023 layak untuk dibahas pada tahap selanjutnya dan untuk dijadikan sebagai agenda prioritas pembahasan bersama antara DPRD Kabupaten Pangandaran dan Bupati Pangandaran.

Demikian dikatakan Cecep Nurhidayat S.Pd saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Persatuan atas penjelasan Bupati Pangandaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran tahun Anggaran 2023, bertempat di gedung Paripurna DPRD Pangandaran, Senin (01/07/2024).

Disampaikannya bahwa, setelah mencermati, mempelajari dan mengamati pemaparan Bupati Pangandaran tentang Rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2023, maka Fraksi Persatuan menganggap perlu untuk memberikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2023 tersebut.

Fraksi Persatuan berpendapat sebagai berikut ini:

1. Saudara Bupati telah menyampikan bahwa APBD Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2023 telah diaudit oleh BPK-RI perwakilan Jawa Barat dengan opini "wajar dengan pengecualian" (WDP) yaitu hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa auditor BPK menyajikan secara wajar dalam semua hal

yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas.

Entitas tersebut

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, terkait hasil audit BPK tahun 2023 DPRD Kabupaten Pangandaran melakukan analisis yang mendalam sehingga menemukan fakta per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 305,89 milyar, utang tersebut meningkat 14,40% dibanding tahun 2022 sebesar Rp. 267,39 milyar.

Penumpukan

utang belanja terjadi karena tidak tersedianya kas yang memadai untuk membayar tagihan belanja dan/atau kewajiban yang ditunjukkan, maka kami dari fraksi persatuan sangat berkepentingan untuk mendapatkan klarifikasi dan verifikasi secara langsung dari BPK.

2. Terkait dengan perangkat desa dilingkungan Kabupaten Pangandaran yang belum mendapatkan haknya selama kurun waktu tertentu, hal ini juga kami dari fraksi persatuan memerlukan penjelasan yang mendetil

3. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada bupati dan wakil bupati yang telah mendekati masa akhir pengabdian dengan jerih payah dan pengorbanan yang dilakukan semoga menjadi investasi positif bagi warga Pangandaran dan menjadi legasi positif dalam sejarah panjang perjalanan Kabupaten Pangandaran.

Pimpinan dan rapat Dewan yang terhormat, dengan latar belakang pemikiran yang telah disampaikan tadi, maka Fraksi Persatuan menyatakan Rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2023 layak untuk dibahas pada tahap selanjutnya dan untuk dijadikan sebagai agenda prioritas pembahasan bersama antara DPRD Kabupaten Pangandaran dan Bupati Pangandaran.

Demikian pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2023 "katanya".

Parigi, 01 Juli 2024

Fraksi Persatuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran

H. Asikin, S.Ag (ketua)

Cecep Nurhidayat, S.Pd (sekertaris).

(Anton AS)